



Radar Bali

Masih Gelap, Tersangka Dugaan Korupsi Kapal

Kejati Tunggu Hasil Ekspose Perkara

DENPASAR - Perkembangan penyidikan dugaan korupsi bantuan kapal untuk sejumlah nelayan di Buleleng, Badung dan Denpasar, masih berjalan tertatih-tatih. Meski sudah tiga bulan lebih berjalan, penyidik Kejati Bali belum menetapkan tersangka. Bahkan untuk ekspose perkara juga tidak kunjung dilakukan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan ketika dikonfirmasi mengatakan, pihak penyidik sampai kemarin masih mengumpulkan data. Nah ketika data lengkap, penyidik baru bakal melakukan ekspose perkara di hadapan pimpinan Kejati Bali.

"Kami masih berupaya mengumpulkan data. Kami juga masih mendalami dengan mengorek keterangan saksi. Baik saksi terkait maupun saksi ahli," papar Ashari kemarin (30/7).

Ditambahkan Ashari, pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka. Terlebih saat ini penyidik sedang mempersiapkan berkas hasil pemeriksaan untuk dilakukan ekspose. Ditanya kapan dilakukan penetapan tersangka?. Ashari pun mengaku tidak bisa memastikan. Lantaran penyidik harus terlebih dulu menggelar ekspose di hadapan pimpinan.

"Semua nanti yang memutuskan pimpinan," terangnya.

"Lanjut dan tidaknya kasus, berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan penyidik," jawabnya, saat ditanya apakah kasus tersebut bakal dihentikan.

Bahkan ketika kembali didekas kapan ekspose dilakukan. Ashari kembali mengaku belum bisa memberikan jadwal. Karena saat ini tengah ada banyak kegiatan di Kejati Bali.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Bali, sebagaimana disampaikan Kasipenkum Humas, Ashari Kurniawan, sudah

mengantongi dua nama calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 11 kapal ikan. Informasi yang diterima, penyidik Pidsus masih bakal memeriksa saksi tambahan, salah satunya Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Narmoko Prasmadji.

Terkait pemeriksaan Dirjen Tangkap KKP, masih menurut penyidik tersebut sangat penting dimintai keterangannya. Pasalnya KKP menganggarkan khusus bantuan kapal untuk nelayan di Buleleng. Anggaran yang dikucurkan dari KKP untuk membuat tujuh kapal dengan kapasitas 30 Gross Tonnage (GT). Data angka itulah yang kini tengah dikembangkan penyidik.

Dalam perkara yang pagu anggaran Rp 10 miliar lebih itu, sejumlah saksi penting sudah diperiksa. Di antaranya Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, KPA, rekanan PT F1 Peraksa, serta sejumlah sekelompok nelayan di Buleleng. (san/wid)

Edisi : Senin, 1 Agustus 2015
Hal : 23